AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11248

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *WALIMATUL 'URS* JANDA BAKIRAI DI KENAGARIAN KOTO SANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK

Community Views on *Walimatul 'Urs* of *Janda Bakirai* in Kenagarian Koto Sani, X Koto Singkarak District, Solok Regency

Jumelda Zalimah & Sofia Ridha
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
jzalimah@gmail.com,; sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

Differences in the implementation of *walimatul 'urs* for *janda bakirai* and unmarried women in Kenagarian Koto Sani have generated diverse community views, particularly regarding restrictions on the form of the wedding celebration and the imposition of a customary sanction in the form of a fine of two *emas* for violators. This study aimed to analyze the implementation of *walimatul 'urs* for *janda bakirai* and community views regarding these customary provisions. The study employed a qualitative approach with a descriptive field research design. Primary data were obtained through interviews with customary leaders, members of the Kerapatan Adat Nagari, community leaders, and *janda bakirai*, whereas secondary data were derived from books, journals, and supporting documents. Data were collected through observation and interviews and were subsequently analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of *walimatul 'urs* for *janda bakirai* differed from that for unmarried women, as they were only permitted to hold a simple ceremony, were not allowed to wear a *suntiang* or organize artistic performances, and

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

were subject to a fine of two *emas* for violating the customary provisions. Community views were divided into two groups: those who supported the provisions because they were considered a marker of marital status and a means of preserving customary traditions, and those who rejected them because the sanctions were considered burdensome and less relevant to current societal conditions. This study confirms that the customary provisions regarding *walimatul 'urs* for *janda bakirai* continue to be observed despite generating differing views within the community. These findings contribute to the development of customary law studies and provide practical implications for customary authorities in evaluating the existing provisions so that cultural values can be preserved without disregarding the principles of social justice.

Keywords: *Walimatul 'Urs*; *Janda Bakirai*; Customary Law; Community Views; Social Justice

Abstrak: Perbedaan pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda *bakirai* dan gadis di Kenagarian Koto Sani menimbulkan beragam pandangan masyarakat, terutama berkaitan dengan pembatasan bentuk walimah dan penerapan sanksi adat berupa denda dua emas bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda *bakirai* serta pandangan masyarakat terhadap ketentuan adat tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, anggota Kerapatan Adat Nagari, tokoh masyarakat, dan janda *bakirai*, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda *bakirai* berbeda dari pelaksanaan bagi gadis, yaitu hanya diperbolehkan menyelenggarakan acara sederhana, tidak menggunakan suntiang, tidak mengadakan pertunjukan kesenian, serta dikenai denda dua emas apabila melanggar ketentuan adat. Pandangan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung karena ketentuan tersebut dianggap sebagai penanda status perkawinan dan bentuk pelestarian adat, serta kelompok yang menolak karena sanksi dinilai memberatkan dan kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan adat mengenai *walimatul 'urs* bagi janda *bakirai* masih dipatuhi meskipun menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum adat dan memberikan implikasi praktis bagi pemangku adat dalam mengevaluasi ketentuan yang berlaku agar tetap mempertahankan nilai budaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial.

Kata Kunci: *Walimatul 'Urs*; Janda *Bakirai*; Hukum Adat; Pandangan Masyarakat; Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah sesuatu akad ataupun akad akan mengikat antara pria siap wanita buat melegalkan ikatan lahir hati antara kedua koyak pihak atas senang berkenan siap keikhlasan itu ialah sesuatu keceriaan hidup berkeluarga akan diliputi rasa kasih cinta siap ketentraman (keamanan) atas metode akan diridhai Allah SWT (Zakiyuddin, 2022; Nazaruddin, 2020; Susanto, 2024). Pernikahan memiliki pandangan dampak hukum,

melakukan pernikahan yakni silih memperoleh hak siap peranan dan bermaksud melangsungkan ikatan pergaulan akan dilandasi bahu- membahu, sebab pernikahan tercantum penerapan agama hingga di intensnya tercantum terdapatnya tujuan ataupun arti menginginkan ridha atas Allah SWT (Mubarok & Hermanto, 2023; Muin et al., 2026; Muttaqin et al., 2026).

Walimatul ursy berarti penyajian santapan buat kegiatan siap (Rendi, 2023). Terdapat pula akan berkata kalau walimatul ursy berarti seluruh berbagai santapan akan dissiapn buat kegiatan siap. Tujuan diadakannya walimatul ursy selaku pemberitahuan atas orang marak mengenai terbentuknya pengesahan ikatan antara pria siap wanita (Muflihah, 2022; Sarinah et al., 2025) . Atas terdapatnya walimatul ursy paling tidak mereka akan dekat hendak mengenali kalau kedua pengantin sudah legal selaku suami istri. Tidak hanya itu, tujuan walimatul ursy pula buat memohon berkah berkat atas seluruh orang supaya keluarga kedua pengantin siap keluarga akan senang (Sutarto et al., 2020; Hasan & Ulum, 2020).

Intens kerangka warga di Nagari Koto Indah Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok ada perbandingan antara perkawinan wanita akan sedang wanita atas perkawinan wanita akan telah siap janda (janda bakirai). Perbandingan ini tidak cuma terdapat atas prosesi adat akan disiap, namun pula atas penerapan siap perkawinan. Penerapan walimatul ursy di Nagari Koto Indah untuk wanita akan telah berkedudukan janda (janda bakirai) wajib disiap atas metode akan simpel, tidak semegah perkawinan wanita akan sedang wanita. Di Nagari Koto Indah, wanita akan telah siap janda diucap atas janda bakirai, bagus perkawinannya putus sebab perceraian ataupun sebab kematian suami. Siap janda akan terdapat di Nagari Koto Indah mau menikah balik, hingga tidak diperbolehkan melakukan perhelatan ataupun walimatul ursy atas siap kelewatan. Mereka lumayan melaksanakannya atas kegiatan simpel, misalnya cuma atas aktivitas mendoa (berharap bersama) tanpa siap besar atas banyak ajakan. Intens penerapannya, mempelai wanita tidak diperbolehkan mengenakan suntiang begitu juga biasanya mempelai wanita, melainkan cuma diperbolehkan memakai bungo sanggua siap selayar. Sedangkan itu, mempelai pria cuma diperbolehkan memakai deta basungkik siap kopiah. Determinasi ini ialah bagian atas ketentuan adat akan legal di Nagari Koto Indah.

Walimatul ursy janda bakirai akan melanggar ketentuan adat Nagari Koto Indah sangat banyak terjalin atas tahun 2022, ialah sebesar 5 orang. Sedangkan itu, atas tahun 2022 hingga 2025 ada sebesar 11 orang janda akan menikah siap terdaftar melaksanakan

pelanggaran keatas determinasi adat akan legal (Informasi Walimatul Ursy Janda Bakirai di Nagari Koto Indah, 2025).

Warga Kenagarian Koto Indah mempunyai beraneka ragam opini hal ketentuan walimah janda bakirai. Oleh sebab itu, berarti buat mengikuti pemikiran warga akan atas siap langsung merasakan ataupun menempuh akibat atas ketentuan adat itu.

Bagi Elidawati, salah seseorang warga Nagari Koto Indah, melaporkan ketidaksetujuannya keatas ketentuan walimah ataupun perhelatan untuk janda bakirai akan siap melanggar dikenakan kompensasi sebesar 2 kencana. Tidak hanya itu, pelanggaran itu pula siap berimplikasi atas peranan meningkatkan keris imam ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku wujud permohonan maaf siap orang 4 tipe ikut ikut siap intens pelanggaran itu. Baginya, determinasi itu lumayan membebankan warga. Tetapi begitu, Elidawati pula melaporkan kalau siap seorang senantiasa mau melakukan walimah atas siap hidup, hingga wajib sedia menyambut akibat siap ganjaran akan sudah diresmikan oleh adat.

Bagi Jendra Mahdi ataupun Labai Sati, salah seseorang niniak mamak di Nagari Koto Indah, penerapan walimah atas siap mewah sepatutnya siap hak individu tiap orang. Oleh sebab itu, baginya, pemberian ganjaran berbentuk kompensasi 2 kencana untuk janda bakirai akan melangsungkan perhelatan besar dikira kurang pas. Jendra Mahdi pula beranggapan kalau jumlah kompensasi itu lumayan besar siap siap digunakan buat keinginan lain akan lebih berarti. Bersumber atas pemikiran itu siap disimpulkan kalau Jendra Mahdi tidak seluruhnya sepakat atas ketentuan adat akan menata walimah untuk janda bakirai, sebab baginya tidak seluruh determinasi adat sedang relevan buat diaplikasikan intens kehidupan warga modern dikala ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan walimatul ‘urs bagi janda bakirai di Kenagarian Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, serta menganalisis pandangan masyarakat terhadap penerapan aturan adat yang mengatur pelaksanaan walimatul ‘urs tersebut, termasuk perbedaan pelaksanaannya dengan walimatul ‘urs bagi perempuan yang belum pernah menikah dan implikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain penelitian deskriptif (Moleong, 2020). Penelitian dilaksanakan

di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok pada tahun 2025 selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan walimatul 'urs janda bakirai serta pandangan masyarakat terhadap ketentuan adat yang berlaku di Nagari Koto Sani.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian (Nurpita et al., 2025; Diana et al., 2017). Informan terdiri atas tokoh adat, yaitu penghulu, manti, dubalang, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh masyarakat, serta janda bakirai yang pernah melanggar ketentuan adat mengenai pelaksanaan walimatul 'urs.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan seluruh informan penelitian (Julianto, 2021 Said & Azhar, 2021) . Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen Kerapatan Adat Nagari (KAN), laporan Walimatul 'Ursy Janda Bakirai di Nagari Koto Sani, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diah, 2024; Purnamasari & Afriansyah, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Artha, 2024). Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara berkesinambungan melalui proses verifikasi terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan walimatul 'urs janda bakirai dan pandangan masyarakat terhadap ketentuan adat yang berlaku di Nagari Koto Sani.

HASIL

Gambaran Umum Nagari Koto Sani

Nagari Koto Sani merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki sejarah yang

berkaitan dengan perkembangan wilayah pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan data Profil Nagari Koto Sani tahun 2025, wilayah nagari terdiri atas empat jorong, yaitu Jorong Atasng Belimbing, Limo Niniak, Kasiak, dan Ujuang Ladang dengan luas wilayah sekitar 70 km². Jumlah penduduk mencapai 8.015 jiwa yang terdiri atas 4.022 laki-laki dan 3.993 perempuan. Dari sisi sarana dan prasarana, Nagari Koto Sani memiliki fasilitas ibadah berupa 7 masjid, 30 mushalla atau surau, 31 TPQ/TPA, dan 10 MDA. Selain itu tersedia pula sarana pendidikan mulai dari PAUD hingga Madrasah Aliyah serta sarana kesehatan berupa Polindes, Posyandu, Puskesmas Pembantu, tenaga bidan dan perawat. Di bidang kesenian, masyarakat masih mempertahankan berbagai kesenian tradisional seperti randai, tari piring, tari talempong, rebana, pencak silat, serta Tari Adok yang menjadi ciri khas Nagari Koto Sani.

Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Janda Bakirai di Nagari Koto Sani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul 'ursy bagi janda bakirai di Nagari Koto Sani memiliki aturan adat yang berbeda dengan pelaksanaan walimah bagi perempuan yang menikah untuk pertama kali. Sebelum melangsungkan pernikahan, pihak keluarga wajib melaporkan rencana pernikahan kepada mamak yang kemudian diteruskan kepada manti dan dubalang sebagai pihak yang berwenang menjelaskan ketentuan adat yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaannya, janda bakirai hanya diperbolehkan menyelenggarakan acara sederhana berupa doa bersama dan tidak diperkenankan mengadakan pesta secara meriah ataupun menghadirkan kesenian tradisional seperti randai. Pengantin perempuan juga tidak diperbolehkan menggunakan suntiang sebagaimana lazim dikenakan oleh pengantin gadis, melainkan hanya diperbolehkan memakai bungo sanggua dan selayar. Sementara itu, pengantin laki-laki hanya diperbolehkan mengenakan deta basungkik dan kopiah sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam dekorasi rumah dan prosesi adat lainnya. Rumah tempat pelaksanaan walimah janda bakirai hanya diperbolehkan menggunakan satu tadia sebagai penutup dinding dan satu lembar kain penutup langit-langit rumah serta hanya menggunakan satu banta randah. Berbeda dengan walimah bagi gadis yang diperbolehkan menggunakan dekorasi lengkap beserta banta besar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar dua emas yang wajib dibayarkan secara lunas sebelum akad nikah dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aturan tersebut telah berlaku sejak 11 Agustus 1966 dan mengalami revisi pada 9 Februari

2017, terutama terkait diperbolehkannya penyembelihan hewan dengan syarat hanya dihadiri oleh mamak pangka.

Pandangan Masyarakat terhadap Walimatul 'Ursy Janda Bakirai

Berdasarkan hasil wawancara, pandangan masyarakat terhadap aturan walimatul 'ursy bagi janda bakirai terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tokoh adat dan sebagian masyarakat yang menyatakan setuju terhadap keberadaan aturan tersebut. Menurut mereka, aturan ini merupakan bagian dari adat salingka nagari yang berfungsi sebagai pembeda antara pernikahan gadis dan janda sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga. Selain itu, denda dua emas dipandang bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk penguatan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat. Dana hasil pembayaran denda juga dimanfaatkan untuk kepentingan Kerapatan Adat Nagari (KAN), kegiatan sosial, bantuan kepada anak yatim, dan kebutuhan kaum.

Di sisi lain, sebagian masyarakat dan janda bakirai yang pernah melanggar aturan tersebut menyatakan kurang setuju terhadap ketentuan adat tersebut. Mereka berpendapat bahwa besarnya denda dua emas cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu. Beberapa informan juga menilai bahwa pembatasan pelaksanaan walimatul 'ursy bagi janda tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini. Meskipun demikian, seluruh informan tetap mengakui bahwa aturan tersebut merupakan hukum adat yang telah berlaku sejak lama sehingga harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Nagari Koto Sani.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Janda Bakirai dalam Perspektif Hukum Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul 'ursy bagi janda bakirai di Nagari Koto Sani merupakan bentuk implementasi hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Aturan mengenai larangan mengadakan pesta secara meriah, penggunaan atribut pengantin yang lebih sederhana, serta kewajiban membayar denda apabila melanggar ketentuan adat merupakan mekanisme sosial yang dibentuk untuk membedakan pelaksanaan pernikahan janda dengan perempuan yang menikah untuk pertama kali. Keberadaan aturan tersebut mencerminkan kuatnya fungsi adat sebagai pedoman kehidupan masyarakat sekaligus sebagai instrumen pengendalian sosial agar

setiap anggota masyarakat mematuhi norma yang telah disepakati secara bersama. Dengan demikian, walimatul 'ursy janda bakirai tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari pelestarian identitas budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Pandangan Masyarakat terhadap Ketentuan Walimatul 'Ursy

Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap aturan walimatul 'ursy bagi janda bakirai. Tokoh adat dan sebagian masyarakat memandang bahwa ketentuan tersebut memiliki tujuan menjaga marwah adat serta memberikan pembeda yang jelas antara pernikahan gadis dan janda. Sebaliknya, sebagian masyarakat, khususnya janda bakirai yang pernah dikenai sanksi adat, menilai bahwa besarnya denda dua emas menjadi beban ekonomi yang cukup berat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara upaya mempertahankan tradisi dengan tuntutan perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seluruh informan tetap mengakui keberadaan aturan adat tersebut sebagai kesepakatan bersama yang wajib dipatuhi selama masih diberlakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.

Analisis Pelaksanaan Walimatul 'Ursy dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan adat mengenai pembatasan walimatul 'ursy bagi janda bakirai perlu dipahami secara proporsional dalam perspektif hukum Islam. Islam pada dasarnya menganjurkan penyelenggaraan walimatul 'ursy sebagai bentuk publikasi pernikahan tanpa membedakan status seseorang sebagai gadis maupun janda. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar janda dan duda segera menikah kembali apabila telah memenuhi syarat guna menjaga kehormatan dan menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, penerapan denda yang terlalu besar berpotensi menjadi hambatan bagi janda untuk melangsungkan pernikahan kembali, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, apabila tujuan utama ketentuan adat adalah menjaga ketertiban dan identitas budaya masyarakat, maka besaran sanksi sebaiknya tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Dengan demikian, pelestarian adat tetap dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan kemudahan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk membangun keluarga yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda bakirai di Nagari Koto Sani merupakan bentuk implementasi hukum adat yang masih dipertahankan sebagai mekanisme pengendalian sosial dan pelestarian identitas budaya masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutarto dan Ngadri (2020) yang menyatakan bahwa *walimatul 'urs* tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang dibentuk oleh nilai-nilai lokal masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengungkap adanya pembatasan pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda bakirai, termasuk larangan penggunaan suntiang, pembatasan bentuk perayaan, serta pemberlakuan sanksi adat berupa denda dua emas sebagai bentuk penegakan norma adat.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hasan dan Ulum (2022) yang menjelaskan bahwa pembatasan pelaksanaan *walimatul 'urs* dapat dipahami dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* apabila bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat menilai besarnya sanksi adat sudah kurang relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini sehingga diperlukan evaluasi agar pelaksanaan adat tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini memperluas kajian Sarinah et al. (2025) dan Rendi (2023) yang membahas hukum dan tujuan *walimatul 'urs* dalam perspektif Islam. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif pelaksanaan walimah sebagai bentuk publikasi pernikahan, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai interaksi antara norma hukum Islam dan hukum adat dalam praktik masyarakat Minangkabau. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aturan adat dipengaruhi tidak hanya oleh legitimasi budaya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai keadilan dan relevansinya dengan perkembangan sosial.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pelaksanaan aturan adat mengenai walimatul ursy bagi janda bakirai di Nagari Koto Sani perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintah nagari, serta tokoh masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sanksi adat agar tetap mampu menjaga eksistensi adat tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum adat dan hukum Islam terkait harmonisasi antara norma adat dan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah, yaitu Nagari Koto Sani, Kabupaten Solok, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada masyarakat adat di daerah lain yang memiliki karakteristik budaya dan ketentuan adat yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan yang dihasilkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas serta menggunakan pendekatan komparatif atau metode campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan walimatul ursy bagi janda dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* bagi janda bakirai di Nagari Koto Sani masih berpedoman pada ketentuan hukum adat yang membedakan pelaksanaannya dengan pernikahan perempuan yang belum pernah menikah, baik dari bentuk perayaan, penggunaan atribut adat, maupun pemberlakuan sanksi berupa denda dua emas bagi pelanggar. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap aturan tersebut; sebagian mendukung sebagai upaya menjaga nilai-nilai adat, sedangkan sebagian lainnya menilai sanksi yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara pelestarian hukum adat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam agar keberlangsungan adat tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, hukum adat, dan kajian sosial keagamaan, dengan memperkaya pemahaman mengenai praktik walimatul 'urs janda bakirai sebagai bentuk interaksi antara norma adat dan nilai-nilai hukum Islam di masyarakat Minangkabau. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aturan adat tidak hanya dipengaruhi oleh legitimasi budaya, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap aspek keadilan, kemanfaatan, dan relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum adat, maqāṣid al-syarī'ah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku adat dan pemerintah nagari dalam mengevaluasi kebijakan adat agar tetap selaras dengan perkembangan masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelaksanaan walimatul 'urs janda bakirai dari perspektif yang lebih luas, seperti menggunakan pendekatan komparatif dengan nagari lain yang memiliki ketentuan adat berbeda atau mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hak asasi manusia, maupun gender. Selain itu, penelitian kuantitatif atau mixed methods juga dapat dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan adat tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah perubahan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Artha, S. N. (2024). *Pengelolaan Lingkungan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta* [Diploma thesis, Politeknik Pariwisata NHI Bandung]. http://repository.poltekpar-nhi.ac.id/2854/

Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata, 17*(2), 84–92. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4bf3a02c11f7b5be37a0425406a16151.pdf

Hasan, M. F. Z., & Ulum, F. (2022). Respon Publik terhadap Pembatasan Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(1). https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/alqadlaya/article/view/2379

Julianto, P. (2021). Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitinjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No. 21 Tahun 2019. *Qawwam: The Leader's Writing, 2*(1), 64–74. https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i1.85

Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 4*(1), 93–108. https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298

Muflihah, L. (2022). *Bridal Shower dalam Budaya Perayaan Pernikahan Kekinian Perspektif Ulama Syafi'iyah* [Undergraduate thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia]. https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/157/

Muin, F., Ahmad, A., Furqon, E., & Rohaya, N. (2026). The problem of legal balance regarding the rights and obligations of husband and wife from the perspective of misyâr marriage (mîtsâqan ghalîẓa) on marriage law. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(1), 19–42. https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.47

Muttaqin, M. Z., Izzi, A. I., Nazar, R. F., Arifin, S. W. T., & Sandra, M. Y. (2026). Family harmony in contemporary Islamic law: Ibn 'Āshūr's maqāṣid perspective on marital rights and duties. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 5*(1), 61–79. https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480

Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 21*(2), 164–174. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110

Nurpita, F., Cahyani, M., Zamsiswaya, & Rahman, L. A. (2026). Teknik Penelitian Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 12*(1), 180–191. https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.10693

Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika, 1*(2), 207–222. https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.896

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration, 1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rendi, A. S. (2023). *Pandangan Hukum Islam Menghadiri Walimatul 'Ursy Tanpa Undangan: Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/30135/

Said, S., & Azhar, A. (2021). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima. *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 4*(1), 29–41. https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.439

Sarinah, M., Silalahi, L. F., & Putri Melisa, V. A. (2025). Hukum dan Tujuan Walimatul 'Ursy Perspektif Hadits Ahkam. *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora, 6*, 68–73. https://ojs.staisamora.ac.id/index.php/samora/article/view/122

Susanto, A. (2024). Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(2), 102–121. https://doi.org/10.51729/sakinah22738

Sutarto, S., Warsah, I., & Ngadri, N. (2021). Kostruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 5*(1), 59–72. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9817

Zakiyuddin, A. (2022). Marriage agreement as a effort forming the sakinah family. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3*(2), 161–174. https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18790